



Foto: Lombok Post

ANGGARAN DAERAH DI TAHUN POLITIK

Minim Akuntabilitas dan Keberpihakan pada Publik

**LAPORAN PEMANTAUAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2024**

ANGGARAN DAERAH DI TAHUN POLITIK

Minim Akuntabilitas dan Keberpihakan pada Publik

Penyusun

Tim Peneliti FITRA NTB

Tata Letak

M. Kasim

Penerbit

FITRA NTB, Januari 2025

Laporan ini bersifat terbuka. Sebagian atau seluruh isi dalam laporan ini dapat dikutip dan disebarluaskan untuk kepentingan kampanye, riset, pendidikan, dan advokasi.

DAFTAR ISI

Bagian 1. Pendahuluan

1.1. Konteks Sosial Politik Daerah	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Metodologi	4

Bagian 2. Temuan-Temuan Kunci

2.1. Tahap Perencanaan dan Pembahasan	5
2.1.1. Ketepatan Waktu Pembahasan	5
2.1.2. Transparansi	6
2.1.3. Analisis Kebijakan Anggaran	7
2.2. Tahap Pelaksanaan	21
2.2.1. Kinerja Realisasi Anggaran	21
2.2.2. Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa	23

Bagian 3. Kesimpulan

3.1. Kesimpulan	27
3.2. Rekomendasi	27

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang berlangsung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember telah mencapai batas akhir. Selama kurun waktu setahun tersebut, FITRA NTB melakukan pemantauan dan mencatat beberapa temuan penting yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Catatan-catatan yang dirangkum dalam **Rapor Pengelolaan APBD NTB Tahun 2024** ini diharapkan dapat memberikan Gambaran situasi tata Kelola APBD dan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam mendorong peningkatan tata Kelola APBD pada tahun-tahun mendatang, terutama potensi risiko pengelolaan anggaran daerah pada tahun politik.

Secara administrasi, Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan, 1.005 desa, dan 145 kelurahan¹. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk NTB sebanyak 5,6 juta yang mendiami wilayah seluas 20.164,8 km², dan tersebar sebagian besar di Pulau Lombok (70,7%) dan sekitar 29,3% penduduk mendiami wilayah Pulau Sumbawa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 709,01 ribu orang atau sekitar 12,91% merupakan penduduk miskin. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,14 orang, maka jumlah rumah tangga miskin di NTB sekitar 171,26 ribu rumah tangga dengan besar Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga secara rata-rata sebesar Rp2,2 juta/rumah tangga/bulan².

Struktur ekonomi Provinsi NTB tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,33%), lalu diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (19,43%)³. Umumnya, penduduk bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 756.147 rumah tangga di NTB bergantung pada sektor pertanian⁴. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mencapai 33,53%, lalu diikuti Perdagangan Besar dan Eceran (18,32%); Industri Pengolahan (12,37%), dan selebih tersebar di beberapa lapangan usaha lainnya⁵.

Tahun 2024 merupakan tahun politik, karena berlangsung pemilu legislative, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak 2024 berlangsung di 37 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Provinsi NTB juga menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Sehingga, komposisi anggota legislative maupun pasangan kepala daerah dipilih pada tahun yang sama, masing-masing pada 14 Februari untuk Pileg dan Pilpres, serta pada 27 November untuk Pemilukada.

Tahun 2024 juga menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang merupakan masa transisi setelah berakhirnya periodisasi RPJMD 2019-2023,

¹ Lihat BPS, Master File Desa Semester 2 Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Oktober 2024

² Lihat BPS, Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Maret 2024. Dengan Garis Kemiskinan ini, maka setidaknya pengeluaran penduduk miskin sebesar Rp17.823/orang/hari, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sekitar Rp 13.489 (75,68%) dan non-makanan sebesar Rp 4.335 (24,32%).

³ Lihat BPS, Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2024, November 2024

⁴ Lihat BPS, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, Agustus 2024.

⁵ Lihat BPS, Profil Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2023, Mei 2024

bersamaan dengan akhir masa jabatan Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB. Selama masa transisi ini, pemerintah pusat menunjuk penjabat (PJ) Gubernur berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota⁶. Dokumen RPD 2024-2026 digunakan oleh PJ Gubernur sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pedoman penyusunan APBD 2024⁷.

Jabatan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah berakhir pada 19 September 2023⁸. Selama masa transisi tersebut sejak tanggal 19 September 2023 hingga sekarang telah ditunjuk 2 orang PJ Gubernur NTB, yaitu Lalu Gita Aryadi dan Hassanuddin. Lalu Gita merupakan Sekda NTB. Lalu Gita menjabat dari 19 September 2023 sampai dengan 23 Juni 2024, atau sekitar 9 bulan, kurang 1 tahun dari ketentuan karena mengundurkan diri dengan alasan akan mengikuti Pilkada 2024⁹. Sejak awal tahun 2023 bermanuver untuk ikut kontestasi Pilkada 2024¹⁰, meskipun pada akhirnya gagal ikut kontestasi Pilkada. Posisi jabatan Sekda NTB selama Lalu Gita mengisi posisi PJ Gubernur NTB dijabat oleh Fathurrahman, Asisten I Setda Provinsi NTB, dari tanggal 3 Oktober 2023-9 Januari 2024. Lalu digantikan oleh Ibnu Salim, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, yang dilantik pada 10 Januari 2024

Selanjutnya, PJ Gubernur NTB dijabat oleh Letjen (Purn) Hassanudin yang dilantik pada 24 Juni 2024¹¹. Hassanudin sebelumnya menjabat sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara dan merupakan pejabat pemerintah pusat dengan jabatan Staf Ahli Kemenko Polhukam.

Dengan demikian, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi terlibat penuh dalam proses perencanaan dan penetapan APBD Murni 2024 yang berlangsung selama 20 hari, sejak penyampaian Rancangan KUA-PPAS dan persetujuan APBD 2024. Sedangkan, PJ Gubernur NTB Hassanudin terlibat dalam perencanaan dan penetapan perubahan APBD 2024. Pembahasan APBD 2024 baik Murni maupun Perubahan dilaksanakan bersama anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang akan kembali maju sebagai calon anggota legislative pada Pileg 2024. Tahapan Pileg 2024 dimulai sejak 1 Mei 2023.

⁶ PJ Gubernur yang ditetapkan oleh Presiden, dalam aturan ini, memiliki kewenangan yang sama dengan Gubernur, tapi dilarang melakukan mutasi ASN, membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan dan program pembangunan pejabat sebelumnya (Pasal 15). Larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Masa jabatan PJ Gubernur berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang.

⁷ Lihat Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

⁸ DPRD NTB mengumumkan pemberhentian pasangan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah yang berakhir masa baktinya pada rapat paripurna yang dilaksanakan Senin, 14 Agustus 2023. Pengumuman pemberhentian dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRD NTB Nauvar Farinduan berdasarkan Surat Nomor 007/889/DPRD/2023, tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masa jabatan tahun 2018-2023.

⁹ Lihat <https://www.tempo.co/politik/pj-gubernur-ntb-mundur-untuk-maju-pilkada-2024-tito-karnavian-lantik-penggantinya-46116> diakses pada 29 Desember 2024.

¹⁰ Lalu Gita Aryadi terpilih sebagai PJ Gubernur dari 3 nama yang diusulkan DPRD NTB, yaitu Lalu Niqman Zahir (Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD), Nizar Ali (Sekjen Kemenag), dan Lalu Gita Aryadi. Keputusan usulan nama-nama calon PJ Gubernur NTB ini merupakan Keputusan rapat antar pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD NTB pada Kamis, 3 Agustus 2023.

Pelaksanaan kontestasi politik sepanjang tahun 2024 diyakini berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. APBD berisiko dipergunakan untuk kepentingan politik oleh para petahana, baik calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah¹². Modus yang umum ditemukan, antara lain (1) menurunkan target (*mark down*) PAD; (2) memanfaatkan belanja hibah dan bantuan sosial; (3) memanfaatkan dana SiLPA; (4) menyalahgunakan penyertaan modal¹³. Penyusunan anggaran pada instansi teknis dan pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD pada akhir tahun anggaran rawan dimanipulasi¹⁴. Risiko penyalahgunaan dana publik tersebut dapat mengganggu pencapaian target pembangunan daerah dan berdampak buruk pada pelayanan publik.

Fokus pembangunan daerah periode 2024-2026 yang tertuang dalam RPD Provinsi NTB terdiri atas 3 pilar utama dan 3 pilar pendukung. Tiga pilar utama, yaitu dimensi pembangunan manusia (*people*), dimensi pembangunan lingkungan (*planet*), dan dimensi pembangunan kesejahteraan (*prosperity*). Adapun 3 pilar pendukung meliputi, dimensi tata kelola (*governance*), dimensi pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), dan dimensi daya saing daerah (*competitiveness*). Berdasarkan RPD tersebut, Provinsi NTB merumuskan tema Pembangunan daerah dalam RKPD 2024 adalah **“Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas”**, dengan 7 prioritas Pembangunan daerah, yaitu:

- (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang
- (2) Pembangunan manusia
- (3) Pembangunan lingkungan
- (4) Pembangunan kesejahteraan
- (5) Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah
- (6) Peningkatan komitmen dan capaian TPB/SDGs, dan

Tabel 1.1. Target Pembangunan Daerah Tahun 2024

INDIKATOR	Target RPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 7,1
Inflasi	2 – 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,98
Rasio Gini	0,366
Angka Kemiskinan (%)	<10
Indeks Pembangunan Manusia	70,88
Pengeluaran per Kapita (Rp ribu)	11.069

Sumber: RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Pencapaian target pembangunan daerah tersebut bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Prinsip anggaran berbasis kinerja yang berlaku sejak ditetapkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menekankan aspek *value for money* (3E):

¹² Lihat Kompas.com,

[https://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/21353301/APBD.Rawan.Dijadikan.Modal.Pemenangan.Petaha na](https://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/21353301/APBD.Rawan.Dijadikan.Modal.Pemenangan.Petaha%20na), diakses pada 29 Desember 2024.

¹³ Seknas Fitra, 2017, APBD di tahun Politik: Rawan Bancakan Menjelang Pilkada, link

https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2019/01/APBD-Rawan-Politisasi_-ADI.pdf, diakses pada 29 Desember 2024.

¹⁴ ICW, 2008, Potensi Korupsi dalam Pelaksanaan Pemilu, link <https://antikorupsi.org/id/article/potensi-korupsi-dalam-pelaksanaan-pemilu>, diakses pada 29 Desember 2024.

ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk memastikan efisiensi anggaran, mendukung pengalokasian anggaran untuk membiayai prioritas program dan kegiatan, serta meningkatkan pelayanan publik.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga berkomitmen untuk melakukan penyehatan anggaran daerah¹⁵. Dalam APBD 2024, beban utang daerah masih cukup tinggi, yang terdiri beban belanja bunga sebesar Rp 45,8 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 222,7 miliar.

1.2 Tujuan

FITRA NTB menyusun Laporan ini dalam rangka:

- 1) Menilai pelaksanaan prinsip-prinsip penganggaran; tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan¹⁶ atau tingkat keberpihakan anggaran pada masyarakat;
- 2) Menilai konsistensi APBD terhadap dokumen RKPD, KUA, dan PPAS¹⁷; dan
- 3) Menilai potensi penggunaan APBD untuk kepentingan politik Pilkada serentak Tahun 2024.

1.3 Metodologi

Metodologi dalam penilaian ini dilakukan melalui pemantauan langsung/observasi, tinjauan dokumen (*desk review*) perencanaan dan penganggaran, serta data-data sekunder lain, seperti pemberitaan media massa daring (*online*) yang memuat berita-berita pelaksanaan sidang-sidang pembahasan APBD, maupun pernyataan-pernyataan pejabat daerah.

¹⁵ Lihat ANTARA, <https://mataram.antaranews.com/berita/305388/pj-gubernur-ntb-dorong-penyehatan-anggaran-daerah>, diakses pada 30 Desember 2024.

¹⁶ UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)

¹⁷ Lihat PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 105.

BAGIAN 2

TEMUAN-TEMUAN KUNCI

2.1 TAHAP PERENCANAAN

2.1.1. Ketepatan Waktu Pembahasan: Tidak tepat waktu dan dibahas terburu-buru

Perencanaan dan pembahasan APBD Provinsi NTB Tahun 2024 tergolong sangat telat dan dibahas sangat kilat. Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk perencanaan dan pembahasan APBD Provinsi NTB tahun 2024 hanya sekitar 20 hari, termasuk hari-hari libur. Padahal dari sisi aturan, tahapan perencanaan anggaran yang dimulai dari penampaian Rancangan KUA-PPAS oleh Gubernur kepada DPRD hingga persetujuan APBD dilaksanakan 4 bulan, paling lambat minggu kedua Juli hingga akhir November.

Praktik yang sudah berjalan bertahun-tahun ini berdampak pada buruknya aspek kualitas proses perencanaan dan pembahasan APBD yang tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat, serta aspek kualitas kebijakan APBD yang dihasilkan. Implikasinya akan diuraikan pada temuan-temuan berikutnya.

Tabel 2.1. Tahapan dan Waktu Perencanaan dan Persetujuan APBD Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Tahapan	Waktu Seharusnya (PP 12/2019)	Waktu Riil	Keterangan
1.	Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2024	Paling lambat minggu II Juli	10 November 2023 ¹⁸	Pasal 90 ayat (1)
2.	Penandatanganan KUA-PPAS 2024	Paling lambat minggu II Agustus	20 November 2023 ¹⁹	Pasal 90 ayat (2)
3.	Penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD 2024	Paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir (awal Oktober)	20 November 2023 ²⁰	Pasal 104 ayat (1)
4.	Persetujuan APBD 2024	Paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai (akhir November)	30 November 2023 ²¹	Pasal 106 ayat (1)
5.	Penyerahan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2024	Paling lambat minggu I Agustus	12 Agustus 2024 ²²	Pasal 169 ayat (1)
6.	Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan 2024	Paling lambat minggu II Agustus	21 Agustus 2024 ²³	Pasal 169 ayat (2)
7.	Penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan 2024	Paling lambat minggu II September	23 Agustus 2024 ²⁴	Pasal 177

¹⁸ Lihat [Provinsi NTB | Pemprov NTB Serahkan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024 kepada DPRD](#), diakses tgl 28 Desember 2024

¹⁹ Lihat [RRI.co.id - Eksekutif dan Legislatif NTB Sepakati KUA PPAS 2024 Sebesar 6,18 Triliun Rupiah Lebih](#), diakses pada 28 Desember 2024

²⁰ Lihat [KPK Awasi Pembahasan dan Penyusunan APBD NTB 2024](#), diakses pada 28 Desember 2024

²¹ Lihat [Sah! APBD NTB 2024 Ditetapkan Rp6,181 Triliun - Detik NTB](#), diakses pada 28 Desember 2024

²² Lihat [Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan II Tahun 2024 | DPRD PROVINSI NTB](#), diakses pada 28 Desember 2024

²³ Lihat [BPKAD Prov. NTB](#), diakses pada 28 Desember 2024

²⁴ Lihat [RRI.co.id - APBD Perubahan 2024 NTB: Pendapatan Daerah 6,72 Triliun Lebih](#), diakses pada 28 Desember 2024

8.	Pesetujuan APBD Perubahan 2024	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir (akhir Agustus)	30 Agustus 2024 ²⁵	Pasal 179 ayat (1)
----	--------------------------------	---	-------------------------------	--------------------

Sumber: Data Primer, Fitra NTB

2.1.2. Transparansi Anggaran: masih terbatas

Pemerintah Provinsi NTB tidak cukup terbuka atas dokumen-dokumen perencanaan APBD 2024, terutama pada masa perubahan APBD. Dari 12 dokumen yang seharusnya dipublikasi kepada publik secara mudah dan tepat waktu, hanya 6 dokumen/informasi yang disediakan dan dapat diakses melalui situs resmi perangkat daerah yang menguasai informasi publik tersebut. Fakta ini tidak berbanding lurus dengan pencapaian NTB sebagai juar 1 Nasional pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

Pada dasarnya, Pemprov NTB telah menyediakan kelembagaan dan saluran penyebarluasan informasi APBD kepada masyarakat, misalnya dengan dengan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, termasuk keberadaan situs resmi PPID²⁶. Namun kelembagaan dan infrastruktur yang tersedia belum dimanfaatkan untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tahu. BAPPEDA dan BPKAD Provinsi NTB merupakan 2 perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik terkait perencanaan dan anggaran daerah²⁷.

APBD yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah seharusnya disebarluaskan oleh pemerintah daerah sejak penyusunan Rancangan APBD, pembahasan Rancangan APBD hingga pengundangan Perda APBD, sebagaimana diatur Pasal 92 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyebarluasan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, UU tersebut mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda APBD, baik secara lisan maupun tertulis, melalui; (a) rapat dengar pendapat umum; (b) kunjungan kerja; (c) sosialisasi; dan/atau (d) seminar, lokakarya, atau diskusi. Dalam rangka pemenuhan hak tersebut, pemerintah daerah wajib menyediakan akses Rancangan APBD secara mudah.

Ketentuan APBD sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi APBD harus dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Tabel 2.2. Ketersediaan Akses Informasi Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Jenis Dokumen	OPD yang Menguasai	Keterangan	Tautan Sumber
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024	BAPPEDA	Tersedia	https://bappeda.ntbprov.go.id/dokumen-rkpd-provinsi-ntb/

²⁵ Lihat [Pemprov dan DPRD NTB Sepakati Raperda Perubahan APBD 2024 - NTB Satu](#), diakses pada 28 Desember 2024

²⁶ Lihat situs resmi PPID Utama Provinsi NTB (<https://ppid.ntbprov.go.id/dip.html>)

²⁷ Lihat Keputusan Sekda Provinsi NTB selaku Atasan PPID Pemprov NTB Nomor 23/1 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.	Rancangan KUA-PPAS 2024	BAPPEDA	Tidak Tersedia	https://bappeda.ntbprov.go.id/dokumen-perencanaan-2/
3.	KUA-PPAS 2024	BAPPEDA, BPKAD	Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik
4.	Nota Keuangan dan RAPBD 2024	BPKAD	Tidak Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik
5.	Perda APBD 2024 dan Lampiran-lampiran	BPKAD	Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik
6.	Pergub APBD 2024 dan Lampiran-lampiran	BPKAD	Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2024	BAPPEDA	Tidak Tersedia	https://bappeda.ntbprov.go.id/dokumen-perencanaan-2/
8.	Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2024	BAPPEDA	Tidak Tersedia	https://bappeda.ntbprov.go.id/dokumen-perencanaan-2/
9.	KUA-PPAS Perubahan 2024	BAPPEDA	Tidak Tersedia	https://bappeda.ntbprov.go.id/dokumen-perencanaan-2/
10.	Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan 2024	BPKAD	Tidak Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik
11.	Perda APBD Perubahan 2024 dan Lampiran-lampiran	BPKAD	Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik
12.	Pergub APBD Perubahan 2024 dan Lampiran-lampiran	BPKAD	Tersedia	https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik

Sumber: Data Primer, Fitra NTB

2.1.3. Analisis Kebijakan Anggaran

1. Belanja Publik Merosot, Belanja Rutin Aparatur Meningkatkan

Proyeksi nominal pendapatan daerah pada APD Murni 2024 sangat pesimis dan tidak sesuai dengan potensi riil. Pemprov NTB menetapkan nominal pendapatan daerah sebesar Rp 6,18 triliun, hanya meningkat 0,9% atau sebesar Rp 56 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2023. Peningkatan ini hanya diproyeksikan dari kontribusi peningkatan PAD sebesar 4% dibandingkan target pada APBD Perubahan 2023.

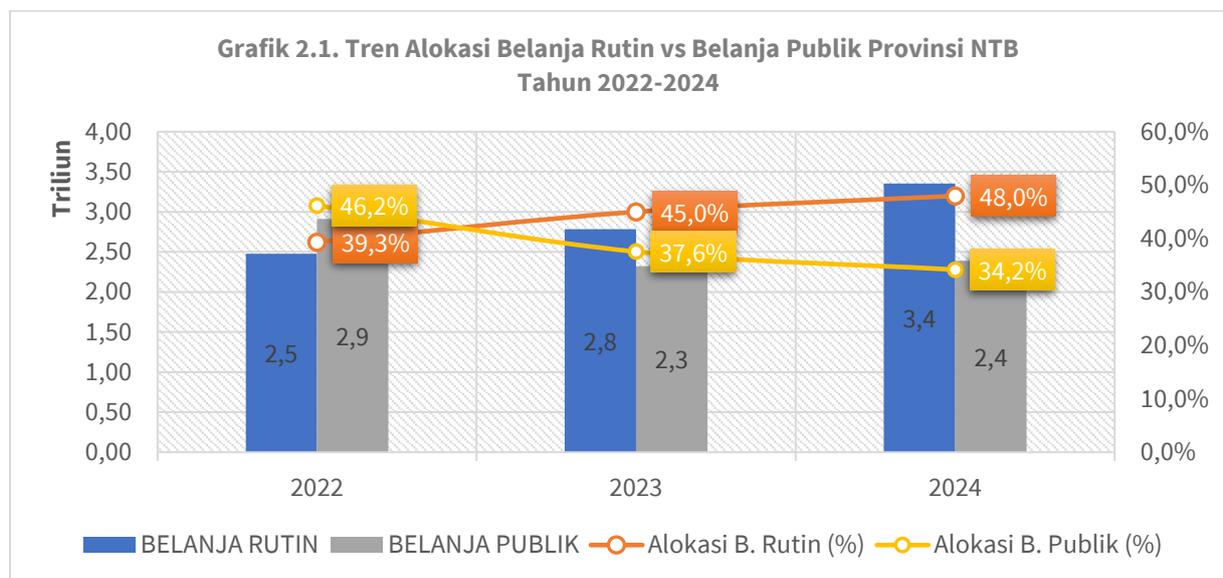
Rendahnya proyeksi pendapatan daerah berimplikasi pada menurunnya alokasi belanja pelayanan dan pembangunan. Nominal belanja daerah diproyeksikan berkontraksi -1,1% menjadi Rp 6,11 triliun dibandingkan APBD Perubahan 2023 yang mencapai angka Rp 6,17 triliun. Hampir seluruh belanja yang terkait dengan pengeluaran pelayanan dan pembangunan mengalami penurunan, sebaliknya alokasi belanja pegawai meningkat 14,3% dan yang lebih fantastis lagi alokasi belanja tidak terduga (BTT) meningkat sangat signifikan menjadi Rp 170 miliar atau sepertiga alokasi belanja modal.

Pada APBD Perubahan 2024, target pendapatan terkontrol signifikan yang dikontribusikan oleh peningkatan proyeksi seluruh komponen pendapatan, kecuali Pajak Daerah. Nominal pendapatan daerah diproyeksikan meningkat 8,8% atau bertambah Rp 544,9 miliar menjadi Rp 6,72 triliun. Nominal PAD bertambah Rp 203,26 miliar, yang bersumber dari peningkatan proyeksi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 189,77 miliar, Lain-lain PAD meningkat sebesar Rp30,14 miliar, dan pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 8,8 miliar. Nominal TKD juga bertambah sebesar Rp 340,7 miliar.

Nominal belanja pada APBD Perubahan 2024 juga tumbuh signifikan, namun peningkatan tersebut tidak sepenuhnya diarahkan untuk belanja publik yang secara nominal masih lebih rendah. Target belanja daerah pada APBD Perubahan 2024 juga meningkat tajam sebesar Rp 658,88 miliar atau 10,8% dibandingkan proyeksi pada APBD Murni. Peningkatan

belanja daerah tersebut diarahkan untuk peningkatan belanja rutin sebesar 12,3% menjadi Rp 3,35 triliun, dan belanja publik bertambah sebesar 14,7% menjadi Rp 2,39 triliun.

Dalam 3 tahun terakhir, alokasi belanja publik menyusut signifikan, sementara di sisi lain alokasi belanja rutin terus meningkat bahkan pada tahun 2024 hampir separuh APBD dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah daerah²⁸. Peningkatan nominal belanja publik sebesar 14,7% pada APBD Perubahan 2024 belum mampu mendongkrak alokasi belanja pelayanan dan pembangunan tersebut dibandingkan alokasinya pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir, alokasi belanja publik terus menurun. Pada tahun 2022, alokasinya sekitar 46,2% atau Rp 2,9 triliun dari total APBD. Sementara pada tahun 2024 menyusut menjadi 34,2% atau sekitar Rp 2,4 triliun. Sebaliknya, alokasi belanja rutin meningkat signifikan dari 39,3% pada tahun 2022 menjadi 48% pada tahun 2024.



Sumber: APBD NTB (diolah).

a) Alokasi Belanja Pegawai pada APBD Murni Cenderung Meningkat dan Tidak Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Alokasi belanja pegawai pada APBD Murni Tahun 2024 tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan²⁹. Nominal belanja pegawai Provinsi NTB pada APBD Murni 2024 sebesar Rp 2,26 triliun, meningkat 20,8% dibandingkan APBD Perubahan 2023, atau sekitar 31,9% dari total belanja APBD. Besaran alokasi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan batas atas belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total APBD.

²⁸ Pengelompokan belanja ini dimaksudkan untuk dapat menilai keberpihakan anggaran daerah pada kepentingan Masyarakat. Belanja rutin didefinisikan sebagai jenis pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk pengeluaran tetap, seperti gaji dan tunjangan, pengeluaran operasional dan administrasi, pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran, maupun pengeluaran untuk Pembangunan dan pemeliharaan Gedung-gedung pemerintahan. Adapun belanja public didefinisikan sebagai jenis belanja daerah yang diarahkan untuk pelayanan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur public selain gedung-gedung pemerintah.

²⁹ Lihat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 146.

Meskipun demikian, alokasi belanja pegawai berada di bawah 30% setelah perubahan APBD 2024. Pada APBD Perubahan, nominal belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 2,38 triliun, meningkat 20,8% atau sebesar Rp 410,87 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. Alokasi Belanja Pegawai Provinsi NTB Tahun 2023-2024

Rincian	2023-M	2023-P	2024-M	2024-P
Belanja Pegawai	2.075.728.187.512	1.975.732.725.913	2.257.683.969.195,00	2.386.599.160.138,00
Tunjangan Profesi Guru (TPG)	258.930.244.000	258.930.244.000	301.434.157.000,00	364.009.337.550,00
Tunjangan Khusus Guru (TKG)	177.739.000	177.739.000	1.736.442.000,00	1.736.442.000,00
Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	7.931.500.000	7.931.500.000	6.853.412.000,00	8.923.412.000,00
Total Belanja Daerah	5.991.980.923.513	6.174.701.023.084	6.108.572.143.903,00	6.767.440.139.732,00
% Total Belanja Pegawai	34,6%	32,0%	37,0%	35,3%
% Belanja Pegawai-Tunjangan Guru	30,2%	27,7%	31,9%	29,7%

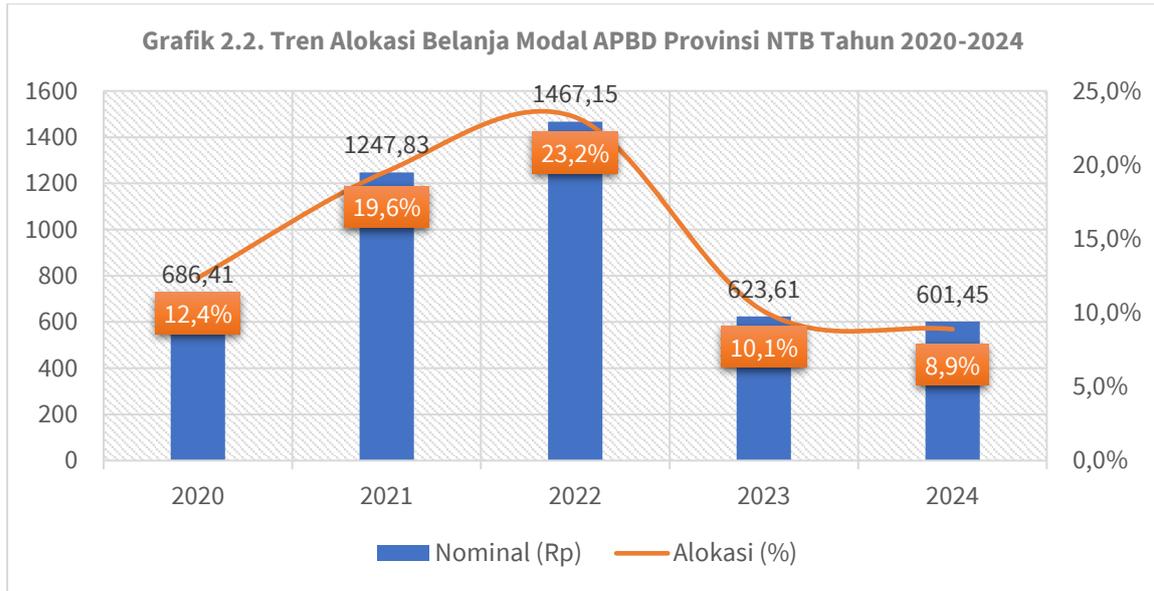
Sumber: APBD NTB (diolah).

b) Alokasi Belanja Modal Semakin Menyusut

Anggaran infrastruktur yang seharusnya dialokasikan oleh Pemprov NTB pada tahun 2024 sebesar Rp 2 triliun lebih, namun belum dipenuhi oleh Pemprov NTB. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 15 Tahun 2023, belanja infrastruktur publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil. Belanja infrastruktur pelayanan publik didefinisikan sebagai belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik. Namun, Pemprov NTB tidak mematuhi ketentuan ini.

Alokasi belanja modal Tahun 2024 tercatat menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir, yang menunjukkan Pemprov NTB tidak memprioritas pembangunan infrastruktur publik pada tahun tersebut. Alokasi belanja modal pada APBD Murni 2024 sebesar Rp 488,65 miliar atau sekitar 8% dari belanja daerah. Lalu pada perubahan APBD 2024 meningkat 23% menjadi Rp 601,4 miliar. Peningkatan nominal belanja modal ini tidak terlalu signifikan mendongkrak alokasi belanja modal secara total terhadap total belanja daerah.

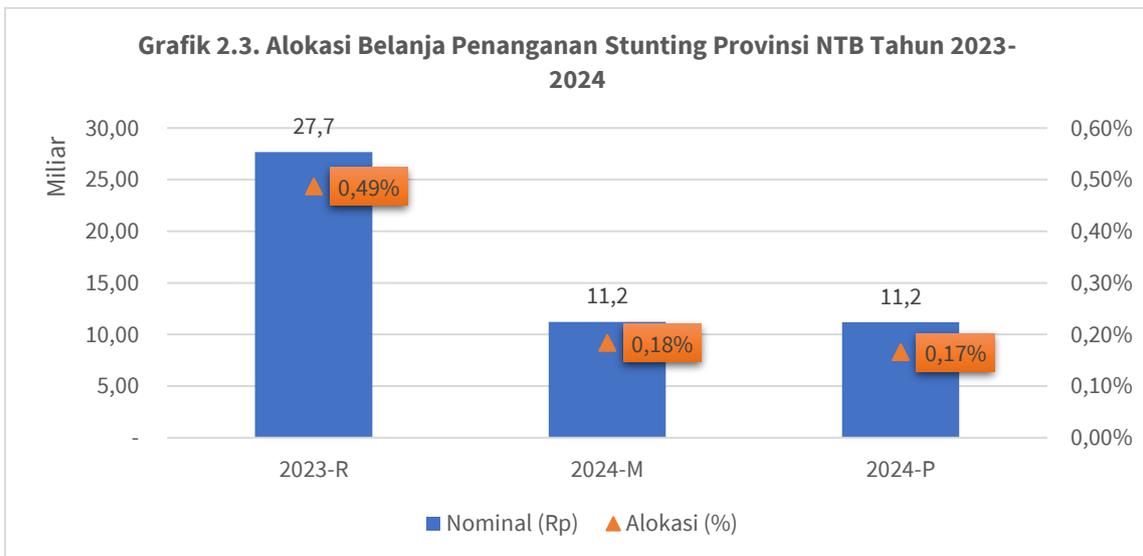
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tergolong sangat kecil pada tahun 2024. Sebagian besar belanja modal dialokasikan untuk pengadaan peralatan dan mesin (Rp 271,4 miliar), dan belanja modal gedung dan bangunan (Rp 232,6 miliar). Sementara itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi hanya sebesar Rp 79,3 miliar atau sekitar 1,2% dari total belanja daerah.



Sumber: APBD NTB (diolah).

c) Anggaran Penanganan Stunting

Penangan stunting sebagai prioritas nasional juga belum didukung dari sisi penganggaran, meskipun APBD NTB meningkat cukup tinggi. Anggaran penanganan stunting tahun 2024 menurun drastis dari Rp 27,7 miliar pada tahun 2023, atau sekitar 0,49% dari total belanja daerah, menjadi Rp 11,2 miliar pada tahun 2024.



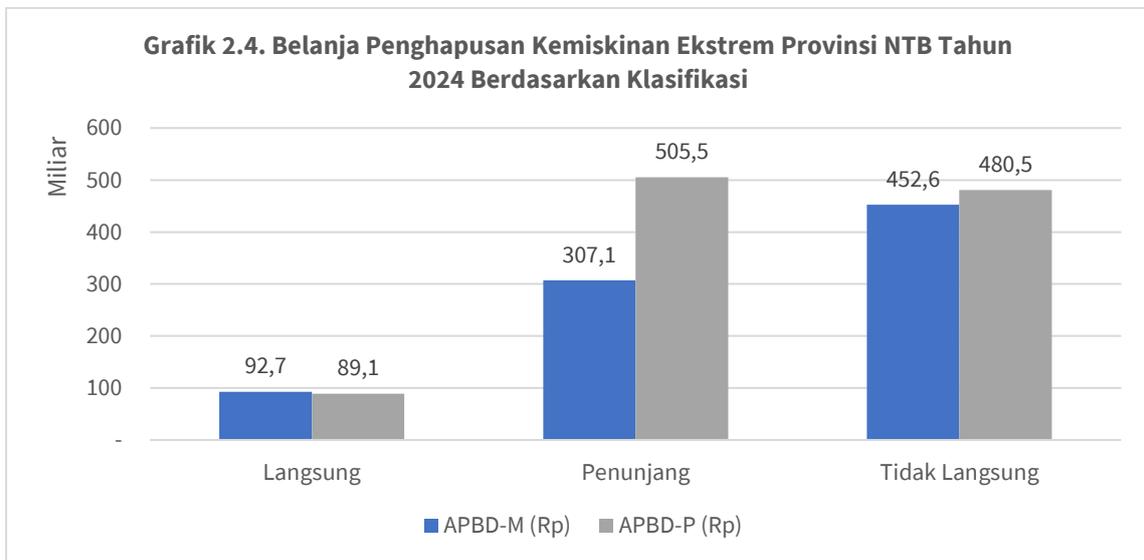
Sumber: APBD NTB (diolah).

d) Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem³⁰

Alokasi anggaran program prioritas nasional penghapusan kemiskinan ekstrem juga kurang berkualitas. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang secara langsung terkait dengan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem justru terpangkas Rp 3,6 miliar pada APBD-P 2024 menjadi Rp 89 miliar. Nominal anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem pada APBD-P meningkat

³⁰ Penandaan anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem mengacu pada PMK Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

menjadi Rp 1,07 triliun, namun peningkatan ini justru pada program/kegiatan yang tidak secara langsung berdampak pada masyarakat, seperti belanja perjalanan dinas yang meningkat dari Rp 4,88 miliar menjadi Rp 5,29 miliar.



Sumber: APBD NTB (diolah).

e) Anggaran Lingkungan Hidup³¹: minim alokasi untuk penegakan hukum

Alokasi anggaran lingkungan tahun 2024 pada APBD Murni dialokasikan sebesar Rp 20 miliar atau sekitar 0,33% dari total belanja daerah. Nominalnya bertambah sekitar 22% pada APBD Perubahan menjadi Rp 24,5 miliar. Namun dari total anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk program perlindungan dan pelestarian, serta program pemanfaatan lingkungan dan SDA. Anggaran yang diarahkan untuk upaya pengendalian dan pengawasan, dan penegakan hukum hanya sekitar 20% atau Rp 4,6 miliar di tengah maraknya tindakan perusakan lingkungan, antara lain perusakan hutan dan tambang ilegal.

Tabel 2.4. Orientasi Anggaran Lingkungan Hidup Provinsi NTB Tahun 2024

ORIENTASI BELANJA	APBD-MURNI 2024		APBD-PERUBAHAN 2024	
	NOMINAL (Rp)	ALOKASI (%)	NOMINAL (Rp)	ALOKASI (%)
PERENCANAAN	1.387.192.100	6,9%	669.692.100	2,7%
PEMANFAATAN	6.693.679.600	33,3%	6.720.179.600	27,4%
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN	7.509.024.325	37,4%	12.479.009.769	50,8%
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	4.447.325.300	22,2%	4.650.324.950	18,9%
PENEGAKAN HUKUM	37.791.500	0,2%	47.887.600	0,2%
TOTAL	20.075.012.825	100,0%	24.567.094.019	100,0%
% ANGGARAN LINGKUNGAN	0,33%		0,36%	

³¹ Anggaran lingkungan hidup adalah anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan dalam rangka perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup, yang mencakup ecoregion darat (hutan, lahan kritis, RTH, keanekaragaman hayati, Sungai, kualitas udara, perairan darat, dan energi), dan ecoregion wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Penandaan anggaran lingkungan hidup meliputi program/kegiatan yang dikelola oleh Dinas PU-PR, Dinas LHK, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengelompokan program dan anggaran mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sinkronisasi RKPD: Anggaran Belanja Publik tidak terdani sesuai perencanaan

Perencanaan program dan kegiatan yang dihabiskan untuk kepentingan masyarakat pada beberapa OPD tidak diikuti dengan komitmen penganggaran. Kondisi ini akan berdampak pada rendahnya efektivitas anggaran dalam pencapaian target yang direncanakan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah juga dapat merosot, karena aspirasi masyarakat yang dipetakan melalui serangkaian kegiatan Musrenbang berjenjang, dari Desa hingga Provinsi, tidak diikuti komitmen penganggaran.

Tabel 2.5. Kesesuaian Pengalokasian Anggaran Belanja Publik antara Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024

OPD	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	RKPD	PPAS	APBD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - Pengadaan Mebel Sekolah	5.719.199.000,00	5.719.199.000,00	2.295.000.000,00
	Pembangunan Ruang Laboratorium	14.699.070.000,00	14.699.070.000,00	10.500.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	6.319.393.000,00	1.800.000.000,00	863.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.880.350.000,00	1.200.000.000,00	821.036.639,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.088.018.220,00	538.314.920,00	588.314.920,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	593.135.475,00	60.000.000,00	60.165.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	948.469.940,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.196.539.900,00	430.000.000,00	559.963.361,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.785.577.740,00	2.424.999.770,00	4.074.999.770,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	874.261.080,00	329.636.100,00	610.636.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.600.511.250,00	3.600.511.250,00	1.500.000.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.698.408.750,00	2.698.408.750,00	1.529.760.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	27.100.000,00	27.100.000,00	-
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.413.551.171,00	11.413.551.171,00	7.356.829.000,00
Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.594.304.284,00	820.000.000,00	2.811.958.000,00
Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.947.497.267,00	21.812.331.200,00	4.754.111.200,00
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	426.000.000,00	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	64.900.000,00	-	-
Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.362.120.947,00	12.355.648.560,00	8.035.648.560,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	8.074.987.400,00	132.355.000,00	123.531.000,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	36.200.000.000,00	3.715.000.000,00	5.040.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Perluasan Kesempatan Kerja	310.544.300,00	-	-
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	39.230.200,00	39.230.200,00	-

	Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	4.090.000,00	4.090.000,00	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	289.142.950,00	-	-
Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	115.000.000,00	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	97.730.500,00	97.730.500,00	50.000.000,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28.769.300,00	28.769.300,00	-
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	60.683.400,00	60.683.400,00	37.791.500,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10.198.879.900,00	558.879.900,00	1.154.600.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	27.000.000,00	36.067.500,00	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL			
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar	20.000.000,00	20.000.000,00	-

	Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	863.938.936,00	863.938.936,00	175.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	4.740.000.000,00	240.000.000,00	50.000.000,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	70.000.000,00	70.000.000,00	6.900.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	10.350.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	631.250.000,00	181.250.000,00	381.250.000,00

3. Anggaran tak wajar³²

(a) Anggaran BTT Rp 170 miliar

Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 170 miliar pada APBD Murni 2024 cukup janggal, mengingat tidak terdapat argumentasi yang mendasari. BTT di daerah secara nasional hanya pernah dialokasikan dalam nominal yang besar pada masa penanganan pandemi Covid-19 lalu. Permendari 15 Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 juga tidak mengarahkan pemerintah daerah untuk menganggarkan BTT dalam jumlah besar. Begitu pun dengan KUA-PPAS yang dipedomani pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan perencanaan dan pembahasan APBD.

Anggaran jumbo BTT pada APBD Murni patut diduga sengaja “diparkir” untuk direalokasi pada APBD Perubahan untuk kepentingan tertentu. Anggaran BTT dalam RKPD hanya dialokasikan sebesar Rp 5 miliar. Sementara pada KUA-PPAS 2024 yang disepakati Pemda dan DPRD NTB menjadi Rp 170 miliar, nominal yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran

³² Anggaran tak wajar adalah anggaran dengan nominal sangat besar atau sangat kecil, tidak memiliki penjelasan sekaligus tidak sesuai kondisi, kebutuhan, dan prioritas Masyarakat, serta tidak memenuhi nilai kepatutan dan keadilan.

penanganan stunting atau belanja modal jalan dan irigasi. Lalu pada perubahan APBD, anggaran BTT malah dipangkas menjadi Rp 4,41 miliar.

Tabel 2.6. Alokasi BTT dalam Dokumen RKPD, KUA, APBD-Murni dan APBD Perubahan Tahun 2024

Rincian	RKPD	KUA-PPAS	APBD	APBD-P
Belanja Tidak Terduga (BTT)	5,00	170,00	170,00	4,41
Belanja Daerah (Rp miliar)	5.739,58	6.108,55	6.108,56	6.767,44
% BTT	0,09%	2,78%	2,78%	0,07%
% Perubahan		3300%	0,0%	-97,4%

Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah).

(b) Pendataan Rumah Korban Bencana Rp 1,4 M

Alokasi anggaran pendataan rumah korban bencana 8 kali lipat lebih besar dibandingkan alokasi untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Logika perencanaan anggaran ini tidak memenuhi prinsip efektivitas dan keadilan anggaran. Anggaran pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang awalnya dialokasikan Rp 8 miliar lebih dalam RKPD, hanya dianggarkan Rp 123 juta dalam APBD. Dan justru kegiatan pendataan yang tidak direncanakan mendapatkan anggaran yang jauh lebih besar. Program/kegiatan ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Tabel 2.7. Perbandingan Alokasi Anggaran Pendataan dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahun 2024

Program/Kegiatan	RKPD	PPAS	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	1.442.632.400,00	1.451.456.400,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	8.074.987.400,00	132.355.000,00	123.531.000,00

(c) Program/Kegiatan Rp 9.000 dan Rp 55.000

Dampak buruk dari pembahasan APBD yang terburu-buru adalah munculnya program/kegiatan dengan nominal anggaran yang aneh. TAPD maupun DPRD NTB tidak menyadari adanya program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9000 atau Rp 55.000. Temuan ini mengindikasikan, TAPD maupun DPRD NTB tidak melakukan pembahasan mendalam selama 10 hari pembahasan APBD NTB Tahun 2024.

Tabel 2.8. Program/Kegiatan dengan nilai sangat kecil/tidak wajar pada APBD Murni 2024

Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Output	Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9.000,00

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9.000,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	9.000,00
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	9.000,00
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	9.000,00
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.000,00
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	9.000,00
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	9.000,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	9.000,00
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	9.000,00
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	9.000,00

			Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afilias	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	9.000,00
			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	9.000,00
			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9.000,00
BLK – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9.000,00
Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	9.000,00
Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	9.000,00

	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	9.000,00
			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	9.000,00
			Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	9.000,00
			Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	9.000,00
			Penampungan Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampung	9.000,00
			Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	9.000,00
			Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	9.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	9.000,00
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	9.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55.000,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	55.000,00

			Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	55.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55.000,00
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	55.000,00
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	55.000,00

			Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
--	--	--	--	--	--

Sumber: APBD-M NTB 2024 (diolah).

(d) Hibah dan Bansos tidak wajar

Anggaran hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan oleh Pemprov NTB juga beberapa dinilai tidak tepat sasaran. Misalnya, terdapat alokasi hibah uang untuk usaha rumah makan sebesar Rp 200 juta, atau bantuan rumah ibadah dengan nominal Rp 1 miliar. Selain itu, ditemukan juga alamat penerima bantuan tidak jelas, penerima bantuan berulang, dan penerima hanya di wilayah tertentu.

Tabel 2.9. Hibah dan Bansos tidak wajar pada APBD 2024

Bantuan/OPD	Nama Penerima	Alamat	Anggaran	Keterangan
Hibah Uang				
Dinas Perdagangan	UMKM lesehan tanak maik	Desa golong Kec. narmada lombok barat	200.000.000,00	Nilai sangat besar dibandingkan bantuan untuk UMKM lain yang lebih layak
Dinas Pariwisata	Kicau Murae Ekor Panjang lombok	Aiq	30.000.000,00	Alamat tidak jelas
Biro Kesejahteraan Rakyat	Masjid Jami' Al-Ikhsan	Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah ³³	1.000.000.000,00	Nilai sangat besar dibandingkan bantuan untuk rumah ibadah lain rata-rata <Rp50 juta
	TAMPIL NTB	Mataram	150.000.000,00	Alamat tidak jelas
	Masjid Jamiq Al-mutaqqin		149.000.000,00	Tidak ada alamat
	Persatuan Pemuda Olahraga Justice	Kel/Desa Perapen Kec. Praya Lombok Tengah	200.000.000,00	Nilai sangat besar dibandingkan kelompok penerima lainnya yang rata-rata <Rp100 juta. Pada tahun 2022 juga jadi penerima bantuan senilai Rp100 juta
Bantuan Sosial	Bansos per orang dengan nominal bantuan yang sama Rp 500 ribu/orang	Se-Lombok	399.000.000	Penerima hanya berlatam di Pulau Lombok

Sumber: APBD-P NTB Tahun 2024 (diolah).

2.2 TAHAP PELAKSANAAN

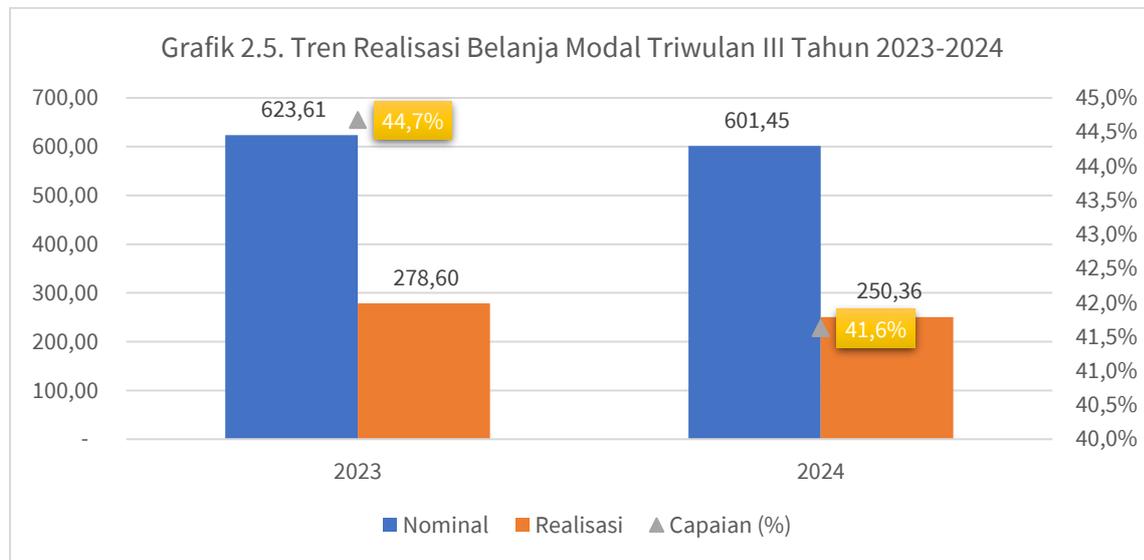
2.2.1 Kinerja Realisasi Anggaran

a. Anggaran belanja Modal menumpuk di triwulan akhir

Meskipun kinerja realisasi APBD NTB Tahun 2024 per kuartal tergolong lebih baik dibandingkan tahun lalu, namun serapan belanja modal jauh lebih rendah. Anggaran belanja modal per triwulan III 2024 terelisasi sekitar 42% dari alokasi pada APBD Perubahan. Capaian ini lebih rendah

³³ Desa kelahiran PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 45% pada triwulan yang sama. Sehingga anggaran menumpuk di triwulan akhir sekitar 58%. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pemanfaatannya oleh masyarakat.



Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah).

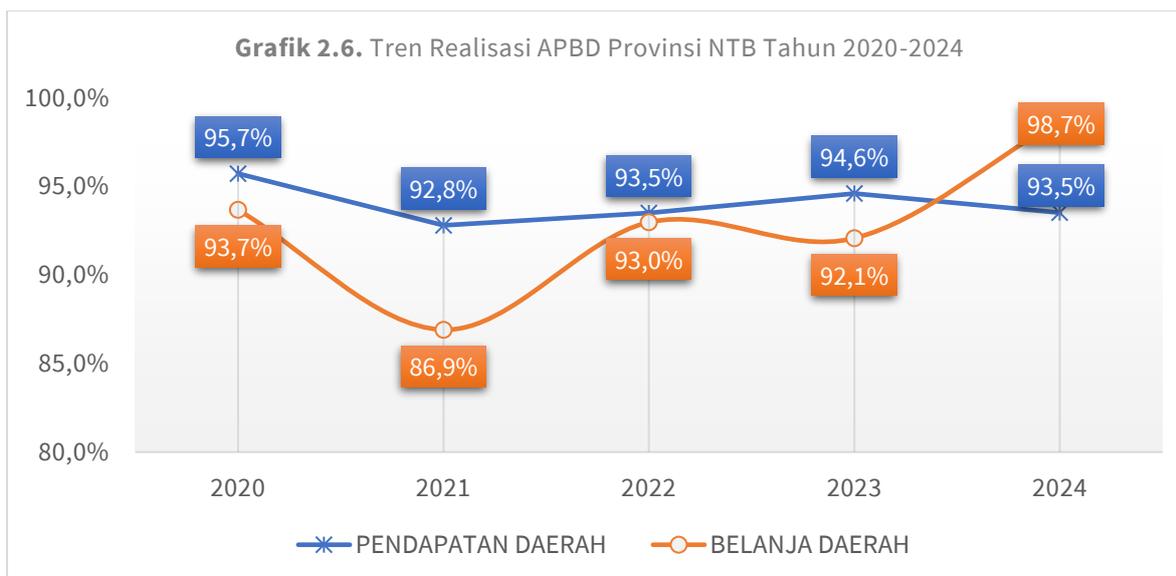
b. Realisasi Pendapatan Triwulan Akhir 2024 Menurun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan³⁴, Kinerja realisasi APBD NTB per 1 Januari 2025 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Realisasi pendapatan daerah mencapai 93,5%, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 98,7%³⁵. Dengan capaian ini, kinerja realisasi pendapatan tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 94,6%. Rendahnya realisasi pendapatan ini dikontribusikan oleh capaian pendapatan retribusi yang tidak mencapai target atau 76,6% dari target sebesar Rp 795,58 miliar. Retribusi ini sebagian besar bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, yang dibayarkan oleh masyarakat yang sakit.

Berdasarkan data yang dipublikasi Kementerian Keuangan, nominal realisasi belanja daerah jauh lebih besar dari pada nominal pendapatan, sehingga menimbulkan defisit sebesar Rp 392,7 miliar, yang tidak tertutupi oleh penerimaan pembiayaan. Jika data ini faktual, potensi munculnya utang program cukup besar pada tahun 2024. Berdasarkan data Kemenkeu, nominal realisasi belanja daerah hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp 6,68 triliun. Nominal ini lebih tinggi dibandingkan klaim pemerintah daerah yang menyatakan realisasi belanja sebesar Rp 6,27 triliun.

³⁴ Lihat <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2024&provinsi=23&pemda=00>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

³⁵ Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad mengatakan angka final realisasi APBD NTB Tahun 2024 masih menunggu rekonsiliasi dengan perangkat daerah. Realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 6,29 triliun (93,49%) dan belanja daerah sebesar Rp 6,28 triliun (92,77%). Lihat <https://suarantb.com/2025/01/02/estimasi-realisisi-apbd-ntb-2024-di-angka-98-persen/#:~:text=Wirawan%20Ahmad%20MT%20mengatakan%2C%20posisi,triliun%20atau%2092%2C77%20persen>, diakses pada 2 Januari 2025.



Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah).

Sektor yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah ke depan adalah kinerja realisasi PAD dan pelaksanaan belanja modal daerah. Meskipun secara umum kinerja realisasi APBD NTB Tahun 2024 tergolong baik, namun pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan kinerja PAD dan belanja modal daerah. Pembenahan di dua sektor ini dapat mempercepat penyehatan fiskal daerah sekaligus memberikan daya ungkit bagi perbaikan ekonomi daerah.

Tabel 2.10. Skor PEFA APBD Provinsi NTB Tahun 2024

PEFA Score	Budget Variance	Observed Budget Variance					
		PENDAPATAN DAERAH	PAD	BELANJA DAERAH	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
A (Sangat Baik)	Less than 5%			1,3%	0,2%	0,3%	
B (Baik)	Less than 10%	6,5%					
C (Cukup)	Less than 15%		10,1%				11,4%
D (Buruk)	Greater than 15%						

2.2.2 Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa³⁶

a. Tahapan Perencanaan Pengadaan: PBJ melalui Swakelola dan Metode Pengadaan Langsung cenderung meningkat

Pagu paket pengadaan tahun 2024 meningkat sangat signifikan mencapai 22%, namun jumlah paket hanya bertambah 6%. Berdasarkan data LPSE Provinsi NTB, perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi NTB tahun 2024 tercatat sebanyak 20.704 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3,52 triliun. Tahun lalu, jumlah paket pengadaan berjumlah 19.584 paket dengan nilai pagu sebesar Rp 2,89 triliun.

Jumlah paket pengadaan melalui Penyedia tahun 2024 meningkat signifikan 19,8%, sehingga proporsinya terhadap total jumlah paket menjadi 72,1%. Sebaliknya jumlah paket pengadaan melalui Swakelola turun 18,9%. Meskipun demikian, nilai paket pengadaan melalui Swakelola

³⁶ Pemantauan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Dashboard Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTB. Link: <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc4/amel/rekap>

meningkat tajam hingga 40,1%³⁷. Nilai paket pengadaan Swakelola di tahun 2024 mencapai Rp 1,67 triliun, sedangkan nilai paket pengadaan melalui Penyedia sebesar Rp 1,85 triliun.

Paket pengadaan barang cenderung meningkat lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan paket pekerjaan konstruksi. Sekitar 53,15% paket pengadaan berupa pengadaan barang, sedangkan peker pekerjaan konstruksi sekitar 32,67% dari keseluruhan jenis paket pengadaan.

Sebagian besar metode rencana pengadaan tahun 2024 menggunakan metode pengadaan langsung (PL)³⁸, baik dari sisi jumlah paket maupun nilai, dengan rata-rata nilai pagu sebesar Rp 145,5 juta per paket. Jumlah paket pengadaan langsung cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Sementara proporsi paket dengan metode Tender untuk pemilihan Penyedia hanya sekitar 0,32%. Sedangkan *e-purchasing* merupakan metode tertinggi kedua yang paling banyak digunakan (28,48%) dengan .

Tabel 2.11. Tren Metode Pengadaan Tahun 2022-2024 Berdasarkan Jumlah Paket dan Nilai Proyek

Cara/Jenis/Metode Pengadaan	Proporsi Jumlah Paket		Proporsi Nilai	
	2023	2024	2023	2024
CARA PENGADAAN				
Swakelola	36,35%	27,90%	41,12%	47,30%
Penyediaan	63,65%	72,10%	58,88%	52,67%
JENIS PENGADAAN				
Pengadaan Barang	40,51%	53,15%	36,49%	38,64%
Pekerjaan Konstruksi	38,24%	32,69%	54,17%	51,97%
Jasa Konsultansi	13,01%	6,07%	1,91%	3,17%
Jasa Lainnya	8,24%	8,08%	7,43%	6,22%
METODE PENGADAAN				
Penunjukan Langsung	2,92%	0,42%	2,05%	0,31%
Pengadaan Langsung	70,78%	70,19%	56,03%	60,02%
E-Purchasing	24,79%	28,48%	29,58%	28,83%
Kontes	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%
Tender	0,30%	0,32%	7,25%	10,01%
Tender Cepat	-	0,01%	0,00%	0,00%
Seleksi	0,07%	0,15%	0,23%	0,79%
Pengecualian	0,95%	0,05%	0,67%	0,03%
Pembayaran untuk Tahun Jamak	0,14%	-	4,19%	0%
TOTAL PAKET DAN NILAI (miliar)	19.584	20.704	2.891,57	3.522,89

³⁷ Pelaksanaan pengadaan Swakelola paling banyak disoroti masyarakat adalah pengelolaan paket pekerjaan yang didanai DAK Bidang Pendidikan Provinsi NTB, yang dilaksanakan melalui Swakelola type I. Berbagai persoalan muncul ke publik, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dari dugaan jual beli proyek sampai dengan operasi tangkap tangan (OTT) Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang diduga memeras penyedia. Hingga sejumlah 14 anggota DPRD NTB mengajukan penggunaan hak interpelasi untuk mengusut pengelolaan DAK yang dikelola Provinsi NTB tahun 2024.

³⁸ Metode pengadaan langsung adalah metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pengadaan langsung jasa konsultansi digunakan untuk proyek jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000 (serratus juta rupiah). Lihat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Transparansi Pengadaan masih terbatas

Salah satu prinsip pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah adalah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Namun hingga akhir tahun, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemprov NTB tidak seluruhnya dipublikasi kepada masyarakat melalui LPSE, dari tahap persiapan hingga serah terima pekerjaan. Penyediaan dan publikasi informasi pengadaan pada seluruh tahapan kepada masyarakat merupakan amanah Perpres Nomor 16 Tahun 2018, untuk dapat memfasilitasi masyarakat melaksanakan pemantauan.



c. Tahapan Persiapan dan Pemilihan Penyedia: Kasus nilai HPS dan kontrak melampaui pagu RUP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu temuan pada tahap persiapan adalah bengkaknya nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dari pagu anggaran dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditetapkan pada tahap perencanaan pengadaan yang diumumkan. Padahal, berdasarkan aturan mengatur bahwa nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran³⁹. Pagu anggaran paket pekerjaan ini sebesar Rp 25 miliar, namun nilai HPS ditetapkan menjadi Rp 49,66 miliar dengan jumlah Penyedia berkontrak sebanyak 3 Penyedia. Satu Penyedia dengan nilai kontrak Rp 24,99 miliar tidak dipublikasi.

Berdasarkan penelusuran media lokal menemukan bahwa barang dari paket pengadaan ini belum ada diterima oleh sekolah-sekolah yang menerima DAK⁴⁰. Berdasarkan RUP, pekerjaan ini berupa pengadaan barang alat peraga praktik sekolah yang dilakukan dengan metode *e-purchasing*, dengan spesifikasi: *Size: 86-inch, Display Scale: 16:9, Backlight Type: D-LED edge type, Maximum Resolution: 3840 x 2160 (pixels)*. Sumber dana pekerjaan ini dianggarkan dari APBD Perubahan 2024 dengan total pagu sebesar Rp 25 miliar. Paket pekerjaan ini diumumkan pada 15 November 2024.

³⁹ Lihat Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, hal. 9

⁴⁰ NTBSatu.com, [Jejak Proyek Smart Class Rp49 Miliar Dikbud NTB tak Ditemukan di Sekolah - NTBSatu](#), diakses pada 16 Januari 2024.

Tabel. 2.12. Detail Paket Pengadaan dengan Nominal HPS melampaui Pagu Anggaran

Tahapan	Paket	Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak	Pemenang	Tanggal Kontrak	Tanggal Realisasi
Perencanaan	53472547 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA tahun 2024	25.000.000.000	49.663.200.000				
Pemilihan	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA tahun 2024			14.782.500.000	PT. Anugerah Bintang Meditama	20 November 2024	20 November 2024
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA tahun 2024			24.997.500.000	Tidak ada data	23 November 2024	Tidak ada data
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Literasi Digital Bidang SMA tahun 2024			9.883.200.000	Karya Pendidikan Bangsa	11 Desember 2024	11 Desember 2024
Jumlah		25.000.000.000	49.663.200.000	49.663.200.000			

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan APBD Provinsi NTB Tahun 2024 belum memenuhi prinsip-prinsip penganggaran. *Pertama*, tingkat transparansi anggaran masih terbatas. Kedua, kualitas proses perencanaan anggaran buruk, karena tidak ada keterlibatan masyarakat serta proses pembahasannya yang sangat singkat dan tergesa-gesa.
- 2) Keberpihakan anggaran untuk kepentingan masyarakat semakin rendah. Peningkatan APBD yang signifikan justru dialokasikan untuk belanja rutin aparatur.
- 3) Perencanaan program dan kegiatan untuk kepentingan publik dan prioritas daerah tidak diikuti komitmen penganggaran.
- 4) Kebijakan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tahun 2024 patut diduga disusun untuk kepentingan aktor-aktor politik yang terlibat dalam kandidasi politik, baik Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024. Yang diindikasikan dengan perubahan pola pengalokasian anggaran dan muncul temuan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran.

Dengan kualitas kebijakan anggaran yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat dan belum sejalan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, sebagaimana temuan-temuan di atas, akan berdampak pada rendahnya efektifitas APBD, khususnya dalam penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat NTB. Target penurunan kemiskinan tahun 2024 di bawah 10% akan sulit tercapai.

3.2 Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan tata kelola APBD Provinsi NTB yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang, berikut beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD NTB:

- 1) Pemerintah Provinsi NTB melalui PPID Utama maupun PPID Pembantu BAPPEDA dan BPKAD agar menyediakan informasi/dokumen perencanaan anggaran daerah secara tepat waktu melalui website yang mudah diakses. Dokumen tersebut terdiri dari RKPD, Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS, KUA-PPAS dan KUPA-PPAS yang disepakati oleh Gubernur dan DPRD, RAPBD dan RAPBD-P, APBD dan APBD-P, serta APBD Realisasi atau pertanggungjawaban beserta LKPJ Gubernur;
- 2) TAPD dan DPRD agar melaksanakan pembahasan anggaran tepat waktu, sesuai peraturan perundang-undangan, dan agar dilaksanakan dalam waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa;
- 3) DPRD NTB agar menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan KUA-PPAS dan RAPBD melalui konsultasi publik atau pertemuan-pertemuan lainnya; dan

- 4) TAPD dan DPRD NTB agar memprioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat miskin, dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, dan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, serta anggaran penegakan hukum lingkungan, dengan memangkas dan merealokasi anggaran belanja rutin.
- 5) Biro Administrasi Pemerintahan dan ULP Pemprov NTB agar mempublikasi perkembangan realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat secara *real-time* dan mudah diakses oleh masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pengadaan yang transparan.